

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/ hasil yang mengutamakan output.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Pada Pemerintah Daerah maka kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dari suatu entitas akuntansi yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD untuk kegiatan SKPD dalam satu periode pelaporan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas.

Laporan Keuangan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah daerah). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2019 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Badan Pendapatan dan Aset Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan kenaikan/penurunan ekuitas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai: 1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan

anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4. Upaya Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; 5. Posisi keuangan dan kondisi Badan Pendapatan dan Aset Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak, retribusi; 6. Perubahan posisi keuangan jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak, retribusi; dan 7. Perubahan posisi keuangan Badan Pendapatan dan Aset Daerah mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2019.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Lapran Keuangan

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) selaku Entitas Akuntansi dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Disamping itu, Laporan Keuangan SKPD juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilai kinerja SKPD, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Kuangan SKPD secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan SKPD dalam membiayai aktivitasnya.

1.3. Dasar Hukum

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (pasal 23 ayat (1): *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*)
2. Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara.
4. Undang-Undang No 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 9 Tahun 2014 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 15 tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 30 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
14. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019.
15. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2019 Tanggal 2 September 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019.

1.4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari dana APBD yang telah direalisasi per 31 Desember 2019 baik dari aspek pendapatan maupun belanja. Laporan Keuangan yang disampaikan terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan Keuangan tersebut diatas disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang keseluruhan isinya menjadi tanggung jawab kami.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

III. Penjelasan Atas Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Laporan Operasional
- C. Neraca
- D. Laporan Perubahan Ekuitas Dana

IV. Informasi Tambahan

V. Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Selama periode Tahun Anggaran 2019, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 15 tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 dan DPA No. BPPKAD.IV/900.910/DPA/100/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA. 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 30 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 dan No. B.KEUDA/900.910/DPPA/66/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA. 2019 mendapat alokasi anggaran dengan realisasi sebagai berikut :

1. Pendapatan

Target Pendapatan sebelum perubahan anggaran 2019 untuk Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 567.933.213.000,- dan setelah perubahan anggaran target Pendapatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertambah sebesar Rp. 78.875.717.313,- sehingga target pendapatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019 menjadi Rp.646.808.930.311,-. Dari target ini terealisasi sebesar Rp. 638.473.518.265,- .Pendapatan diatas terdiri dari pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 635.562.464.311,-, terealisasi sebesar Rp. 628.571.124.014,- pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.225.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 818.500.000,- dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 10.021.066.001,- terealisasi sebesar Rp. 9.083.894.251,-.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 874.682.237.999,- mengalami penurunan sebesar Rp. 236.208.719.734,- atau 27,01 %. Penurunan pendapatan ini disebabkan karena Pajak Rokok di tahun 2019 dikelola oleh Badan Keuangan Provinsi

NTT. Kelompok dan jenis Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- 1) Pajak Daerah target sebesar Rp. 635.562.464.311,- realisasi sebesar Rp. 628.571.124.014,- atau 98,90%. Adapun Pendapatan Pajak Daerah diperoleh dari : Pajak Kendaraan Bermotor target Rp. 228.075.491.601,- realisasi sebesar Rp. 231.471.136.410,- (101,48%); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor target Rp. 244.486.972.710,- realisasi sebesar Rp. 227.669.036.440,- (93,12%); dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor target Rp. 163.000.000.000,- realisasi sebesar Rp. 169.430.951.164,- (103,94%).
- 2) Pendapatan Retribusi target sebesar Rp. 1.225.400.000,- realisasi sebesar Rp. 818.500.000,- atau 66,79%. Adapun Pendapatan Retribusi diperoleh dari : Retribusi Jasa Usaha target Rp. 1.225.400.000,- yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah target Rp. 1.222.400.000,- realisasi sebesar Rp. 818.500.000,- (66,96%) dan retribusi Tempat Khusus Parkir target Rp. 3.000.000.000,- realisasi sebesar Rp. -, (-%).
- 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah target sebesar Rp. 10.021.006.001,- realisasi sebesar Rp. 9.083.894.251,- (90,64%). Adapun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diperoleh dari : Pendapatan Denda Pajak target Rp. 6.776.778.507,- realisasi sebesar Rp. 6.649.567.298,- (98,12%) dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah target Rp. 3.244.287.494,- realisasi sebesar Rp. 2.434.326.953,- (75,03%).

2. Belanja

Target belanja sebelum perubahan anggaran 2019 untuk Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar sebesar Rp. 94.489.510.364,- setelah perubahan anggaran target belanja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertambah sebesar Rp. 6.134.199.886,- sehingga target belanja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019 menjadi Rp. 100.623.710.250,- , dari target ini terealisasi sebesar Rp. 89.704.453.694,-. Belanja dijabarkan dalam Program, Kelompok dan Jenis Belanja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Tidak Langsung target Rp. 48.187.574.000,- realisasi Rp. 43.187.958.551,- (89,62%) terdiri dari :
- Gaji dan Tunjangan target Rp. 19.830.984.984,- realisasi Rp. 18.205.062.797 ,- (91,80%).
 - Tambahan Penghasilan PNS target Rp. 7.589.729.000,- realisasi Rp. 7.399.689.100 ,- (97,50%).
 - Insentif Pemungutan Pajak Daerah target Rp. 20.730.098.016,- realisasi Rp. 17.583.206.654 ,- (84,82%).
 - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah target Rp. 36.762.000,- realisasi Rp. 0,00.,- (0,00%).
- 2) Belanja Langsung target Rp. 52.436.136.250,- realisasi Rp. 46.516.495.143,- (88,71%) terdiri dari :
- ✚ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar Rp. 9.407.112.338,- atau 92,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.194.166.240,- terdiri dari :
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasi sebesar Rp. 65.671.620 ,- atau 85,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 76.773.000,-
 - Kegiatan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik direalisasi sebesar Rp. 3.149.590.164,- atau 88,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.574.741.500,-
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional direalisasi sebesar Rp. 604.031.100 ,- atau 95,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 635.000.000,-.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan direalisasi sebesar Rp. 459.815.000 ,- atau 94,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 488.950.000,-
 - Kegiatan Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor direalisasi sebesar Rp. 179.100.515,- atau 98,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 181.261.300,-
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor direalisasi sebesar Rp. 1.048.870.256,- atau 98,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.064.466.000,-

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan direalisasikan sebesar Rp. 1.010.498.987,- atau 86,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.172.251.800,-
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik direalisasikan sebesar Rp. 43.289.000 ,- atau 95,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 45.500.000,-
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan direalisasikan sebesar Rp. 43.142.000 ,- atau 84,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 50.900.000,-
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman direalisasikan sebesar Rp. 483.216.202 ,- atau 99,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 485.976.320,-
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah direalisasikan sebesar Rp. 178.804.200 ,- atau 91,88% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 194.600.000,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas direalisasikan sebesar Rp. 184.535.104 ,- atau 83,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 220.400.000,-
- Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah direalisasikan sebesar Rp. 120.282.630 ,- atau 92,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 130.000.000,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor direalisasikan sebesar Rp. 1.576.421.650 ,- atau 99,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.584.500.000,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial direalisasikan sebesar Rp. 210.124.890 ,- atau 87,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 238.846.320,-
- Pendidikan dan Pelatihan Formal direalisasikan sebesar Rp. 49.719.020,- atau 99,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 🚧 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi sebesar Rp. 12.818.688.415,- atau 80,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 16.007.121.250,- terdiri dari :

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor direalisasikan sebesar Rp. 2.495.044.250,- atau 96,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.597.174.250,-
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional direalisasikan sebesar Rp. 6.161.350.000,- atau 76,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.063.150.000,-
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor direalisasikan sebesar Rp. 294.299.800,- atau 96,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 305.988.000,-
- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor direalisasikan sebesar Rp. 357.239.627,- atau 88,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 404.492.000,-
- Kegiatan Pengadaan Meubelair direalisasikan sebesar Rp. 163.235.800,- atau 98,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 166.050.000,-
- Kegiatan Pengadaan Sistem Jaringan direalisasikan sebesar Rp. 795.888.640,- atau 50,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.578.775.000,-
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor direalisasikan sebesar Rp. 153.848.500,- atau 79,51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 193.500.000,-
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas direalisasikan sebesar Rp. 1.030.146.243,- atau 90,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.141.242.000,-
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor direalisasikan sebesar Rp. 123.705.500,- atau 96,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 128.500.000,-
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan direalisasikan sebesar Rp. 247.300.000,- atau 95,87% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 257.950.000,-
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor direalisasikan sebesar Rp. 996.130.055,- atau 85,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.170.300.000,-

- ✚ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terealisasi sebesar Rp.154.594.081,- atau 99,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 154.931.080,- terdiri dari :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar direalisasi Kinerja SKPD direalisasi sebesar Rp. 154.594.081,- atau 99,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 154.931.080,-
- ✚ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp. 24.136.100.309,- atau 92,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 26.079.917.680,- terdiri dari :
 1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan direalisasi sebesar Rp. 3.600.702.871,- atau 68,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.260.470.680,-
 2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah direalisasi sebesar Rp. 231.277.410 ,- atau 99,91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 231.475.000,-.
 3. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah direalisasi sebesar Rp. 20.304.120.028,- atau 98,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 20.587.972.000,-

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan baik pendapatan maupun belanja. Pendapatan yang tidak melampaui target yang agak signifikan adalah Retribusi Daerah . Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp 815.100.000,00 atau 66,52% dari target sebesar Rp 1.225.400.000,00,- . Sedangkan jenis pendapatan yang lain di atas 90 % dari target yang ditetapkan.

Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, secara umum telah tercapai sesuai dengan sasaran, kecuali beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 75 % dari anggaran yakni :

1. Kegiatan Pengadaan Sistem Jaringan direalisasi sebesar Rp. 795.388.640,- atau 50,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.578.775.000,-, hal tersebut disebabkan karena beberapa jenis belanja di kegiatan ini tidak

direalisasikan antara lain : a. Belanja Jaringan Mobil Samsat keliling (Rp. 200.000.000,-), b. Belanja Jaringan VPN/Visat IP Samsat Gendong bagi 22 UPTD (Rp. 246.000.000,-).

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/ Barang Daerah direalisasi sebesar Rp. 3.600.702.871,- atau 68,45 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.260.470.680,00, hal tersebut disebabkan karena beberapa item Belanja dalam kegiatan ini tidak direalisasikan antara lain : a. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Provinsi NTT tidak seluruhnya direalisasi karena yg diasuransikan hanya aset gedung saja (Rp. 1.042.642.162,-), b. Belanja Publikasi atas aset yang akan disewakan atau di BGSkan (Rp. 150.000.000,-),

BAB III
PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Penjelasan atas pos – pos pada laporan keuangan menyajikan penjelasan bersifat naratif terhadap angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

1.1. Pendapatan

Target Pendapatan untuk Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan APBD TA. 2019 sebesar RP. 567.933.213.000,- dan mengalami penambahan pada perubahan APBD TA. 2019 sebesar Rp. 78.875.717.313,- sehingga menjadi Rp. 646.808.930.311,- (12,19 %). Dari target tersebut dapat direalisasi sebesar Rp. 638.473.518.265,- (98,71%). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 874.682.237.999,00,- ada penurunan sebesar Rp 236.208.719.734,- (27,01%). Penurunan realisasi ini disebabkan pajak rokok sudah dialihkan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Pendapatan terdiri dari :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.1.1. Pajak Daerah	Rp. 638.473.518.265,-	Rp. 874.682.237.999,-

Pendapatan Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 635.562.464.311,-, terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 628.571.124.014,--** atau **98,90%**.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi sebesar Rp. **231.471.136.410,-** atau **101,49%** dari yang ditargetkan sebesar Rp. **228.075.491.601,-**. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini tersebar di 22 UPT Pendapatan dan Aset Daerah diwilayah Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

No	UPT - UPT	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang Target (Rp.)	%
1	Kota Kupang	73.174.984.534	80.027.794.217	6.852.809.683	109,36
2	Kab. Kupang	12.931.368.958	7.400.894.446	(5.530.474.512)	57,23
3	Rote Ndao	3.692.963.231	5.449.117.052	1.756.153.821	147,55
4	Sabu Raijua	1.780.823.000	1.209.519.800	(551.303.200)	69,04
5	TTS	12.969.173.876	12.797.595.322	(171.578.554)	98,68
6	TTU	9.962.188.986	10.775.872.499	813.683.513	108,17
7	Belu	15.313.620.404	17.552.467.265	2.238.846.861	114,62
8	Malaka	5.030.468.000	2.165.163.150	(2.865.304.850)	43,04
9	Alor	3.880.542.540	3.249.290.175	(631.252.365)	83,73
10	Lembata	3.861.625.817	4.138.558.897	276.933.080	107,17
11	Flores Timur	6.637.871.267	7.245.796.268	607.925.001	109,16
12	Sikka	12.716.750.335	11.968.697.638	(748.052.697)	94,12
13	Ende	9.880.207.041	10.501.592.883	621.385.842	106,29
14	Nagekeo	4.049.494.131	3.813.006.999	(236.487.132)	94,16
15	Ngada	5.905.144.641	6.193.706.862	288.562.221	104,89
16	Manggarai Timur	4.895.959.005	4.619.925.787	(276.033.218)	94,36
17	Manggarai	13.701.863.220	13.088.057.560	(613.805.660)	95,52
18	Manggarai Barat	7.558.270.187	7.809.423.173	251.152.986	103,32
19	Sumba Timur	9.781.410.865	9.843.800.622	62.389.757	100,64
20	Sumba Barat	4.896.792.358	4.830.344.672	(66.447.686)	98,64
21	Sumba Barat Daya	4.235.961.968	4.173.023.567	(62.938.401)	98,51
22	Sumba Tengah	1.218.007.236	1.388.557.146	170.549.910	114,00
23	Payment On Line		1.208.930.410	-	-
Total		228.075.491.601	231.471.136.410	2.186.714.400	101,49

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar Rp. **227.669.036.440,-** atau **93,12%** dari yang ditargetkan sebesar Rp. **244.486.972.710,-**. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini tersebar di 22 UPT Pendapatan dan Aset Daerah di wilayah Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

No	UPT - UPT	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/ (Kurang) Target (Rp.)	%
1	Kota Kupang	72.207.475.172	86.309.501.500	14.102.026.328	119,53
2	Kabupaten Kupang	17.643.816.489	122.339.500	(17.521.476.989)	0,69
3	Rote Ndao	3.720.060.572	4.555.924.100	835.863.528	122,47
4	Sabu Raijua	2.207.481.000	-	-	-
5	TTS	17.491.398.647	15.413.722.000	(2.077.676.647)	88,12
6	TTU	13.138.178.814	10.937.405.250	(2.200.773.564)	83,25
7	Belu	15.224.406.749	19.860.573.500	4.636.166.751	130,45
8	Malaka	8.336.519.750	-	-	-
9	Alor	4.079.872.646	3.653.462.000	(426.410.646)	89,55
10	Lembata	4.133.670.933	3.709.054.500	(424.616.433)	89,73
11	Flores Timur	7.654.480.005	6.982.765.000	(671.715.005)	91,22
12	Sikka	15.240.988.725	15.131.910.200	(109.078.525)	99,28
13	Ende	10.962.108.889	10.036.463.750	(925.645.139)	91,56
14	Nagekeo	4.095.636.761	4.161.626.000	65.989.239	101,61
15	Ngada	3.853.665.250	4.095.595.840	241.930.590	106,28
16	Manggarai Timur	5.038.474.653	6.036.792.000	998.317.347	119,81
17	Manggarai	12.534.858.478	11.953.915.250	(580.943.228)	95,37
18	Manggarai Barat	11.686.588.149	11.299.218.000	(387.370.149)	96,69
19	Sumba Timur	7.730.073.529	6.823.324.000	(906.749.529)	88,27
20	Sumba Barat	3.428.385.583	2.669.151.000	(759.234.583)	77,85
21	Sumba Barat Daya	2.617.961.833	3.132.107.500	514.145.667	119,64
22	Sumba Tengah	1.460.870.083	784.180.550	(676.689.533)	53,68
Total		244.486.972.710	227.669.031.440	(16.817.941.270)	93,12

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terealisasi sebesar Rp. **169.430.951.164,-** atau **103,95 %** dari yang ditargetkan sebesar Rp. **163.000.000.000,-**. Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ini terdiri dari Premium sebesar **Rp. 81.065.544.462,-** dan Solar sebesar **Rp. 26.411.733.415,-**. Realisasi dari Premium sebesar **Rp. 74.266.572.615,-** Solar realisasi sebesar Rp. **2.259.227.3742,-**. Ada tambahan realisasi sebesar : **Rp. 87.905.151.175,-** dari beberapa jenis bahan bakar yang tidak ditargetkan adalah : Pertamina, Bio Solar, Pertamina Dex, Peralite, Pertamina Plus dan Dexlite. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) ini tersebar di 22 UPT Pendapatan dan Aset Daerah di wilayah Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

NO	UPT-UPT	TARGET	REALISASI	LEBIH/(KURANG) TARGET (Rp)	%
1	Kota Kupang	40.915.359.000	41.646.404.324	731.045.324	101,79
2	Kabupaten Kupang	6.528.841.000	6.309.246.209	(219.594.791)	96,64
3	Rote Ndao	2.439.701.000	2.748.852.843	309.151.843	112,67
4	Sabu Raijua	952.422.000	1.057.891.308	105.469.308	111,07
5	TTS	7.097.925.000	8.219.780.028	1.121.855.028	115,81
6	TTU	5.830.374.000	6.199.616.018	369.242.018	106,33
7	Belu	8.708.403.000	8.813.550.059	105.147.059	101,21
8	Malaka	3.472.508.000	3.447.341.754	(25.166.246)	99,28
9	Alor	4.802.667.000	5.027.056.427	224.389.427	104,67
10	Lembata	2.360.129.000	2.619.952.168	259.823.168	111,01
11	Flores Timur	6.244.955.000	6.245.533.225	578.225	100,01
12	Sikka	11.424.858.000	12.226.298.155	801.440.155	107,01
13	Ende	9.221.546.000	8.595.493.956	(626.052.044)	93,21
14	Nagekeo	4.072.456.000	4.584.992.849	512.536.849	112,59
15	Ngada	4.445.730.000	4.604.899.400	159.169.400	103,58
16	Manggarai Timur	2.874.162.000	4.052.384.564	1.178.222.564	140,99
17	Manggarai	10.542.318.000	10.830.348.997	288.030.997	102,73
18	Manggarai Barat	9.568.280.000	9.721.221.499	152.941.499	101,60
19	Sumba Timur	10.677.585.000	11.211.129.276	533.544.276	105,00

20	Sumba Barat	4.512.813.000	4.611.156.955	98.343.955	102,18
21	Sumba Barat Daya	4.525.649.000	4.586.952.368	61.303.368	101,35
22	Sumba Tengah	1.781.319.000	2.051.686.762	270.367.762	115,18
TOTAL		163.000.000.000	169.411.789.144	6.411.789.144	103,93

1.1.2. Retribusi Daerah	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp. 818.500.000,-	Rp. 805.724.000,-

Pendapatan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. **1.225.400.000,-** di tahun anggaran 2019 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 818.500.000,-** atau **66,79%**.

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp.**803.324.000,-** atau **66,96%** dari yang ditargetkan sebesar Rp. **1.222.400.000,-**.

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar **Rp. 0,-** atau **0 %** dari yang ditargetkan sebesar **Rp. 3.000.000.000,-**.

1.1.3. Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp. 9.083.894.251,-	Rp. 8.331.948.167,-

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari : Pendapatan Denda Pajak dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sebesar **Rp. 10.021.066.001,-** di tahun anggaran 2019 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 9.083.894.251,-** atau **90,65%**.

Lain - lain Pendapatan yang Sah terdiri dari :

a. Pendapatan Denda Pajak

Terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp. **6.276.274.969,-** atau 98,46% dari yang ditargetkan sebesar Rp. **6.376.423.265,-** dan Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp. **371.295.529,-** atau 92,74% dari yang ditargetkan sebesar Rp. **400.355.242,-**.

b. Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Terdiri dari sewa tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTT antara lain :

1. Sewa tanah dan bangunan oleh Toko Cahaya Bangunan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 80.625.000,-
2. Lahan Parkir di Hotel Grenia Oebobo terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 200% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 7.500.000,-
3. Sewa Tanah Samping Toko Populer terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 176,47% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 8.500.000,-
4. Sewa Tanah oleh PT Pertamina terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau 0% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 24.000.000,-
5. Sewa Tanah eks Sekolah Cina terealisasi sebesar Rp. 48.250.000,00,- atau 99,59% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 48.450.000,-
6. Sewa Tanah untuk usaha meubelair samping Rumah Jabatan Gubernur terealisasi sebesar Rp. 5.600.000,00,- atau 116,67% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 4.800.000,-
7. Sewa Tanah untuk usaha warung dalam Kompleks DPRD terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,00,- atau 100% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 7.000.000,-
8. Sewa Tanah di belakang Hotel Cendana terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,00,- atau 30,77% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 6.500.000,-

9. Sewa Tanah untuk Rumah Makan (Muntinah) terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00,- atau 100% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 15.000.000,-
10. Sewa Tanah samping KPU (Mujianto) terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,00,- atau 100% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 6.000.000,-
11. Sewa Lahan di PPI Tenau (Hardi) terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,00,- atau 100% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 7.000.000,-
12. Sewa Tanah di Sikka terealisasi sebesar Rp. 0,00 ,- atau 0 % dari yang ditargetkan sebesar Rp. 5.000.000,- .
13. Sewa Lahan di Jalan Polisi Militer terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau 0% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 3.800.000,-
14. Sewa Gedung Ex. Rumah Jabatan Kabid Farmasi Kanwil Kesehatan NTT terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 6.000.000,-
15. Sewa Bangunan untuk PUSKUD terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 8.000.000,-
16. Sewa Tanah oleh PT. Kupang Resource di KI Bolok terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau 0% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 40.000.000,-
17. Kontribusi atas pemanfaatan tanah dengan pola Bangun Guna Serah (BGS) oleh PT. Sasando Internasional terealisasi sebesar Rp. 315.000.000,00,- atau 104,51% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 301.415.000,-
18. Kontribusi atas pemanfaatan tanah dengan pola Bangun Guna Serah (BGS) oleh PT. Nusa Bahana Niaga terealisasi sebesar Rp. 559.600.077,00,-, atau 100% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 559.600.077,-
19. Sewa Tanah oleh PT. Bunga Raya Lestari terealisasi sebesar Rp. 90.000.000,- atau 300% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 30.000.000,-
20. Sewa Tanah di Jl. El Tari (Deny Haryanto) terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 37.000.000,-, untuk sewa tanah ini tidak dilanjutkan lagi sejak akhir 2019.

21. Sewa Tanah di Jl. Frans Seda (April Viva Djianto) terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau 0% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 55.000.000,-
22. Kontribusi atas pemanfaatan tanah dengan pola Bangun Guna Serah (BGS) Eks Gedung SPG terealisasi sebesar Rp. 262.001.552,- atau 94,00% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 300.000.000,-
23. Pemanfaatan Aset Daerah (Kuliner) terealisasi sebesar Rp. 300.000.000,- atau 60% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 500.000.000,-
24. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh CV. Nelayan Hidup Makmur terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp.15.000.000,-.
25. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh UD. Cahaya Baru terealisasi sebesar Rp. 0,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000,-.
26. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh Jubaidah terealisasi sebesar Rp. 1.000.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.000.000,-.
27. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh Jamaludin terealisasi sebesar Rp. 0,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000,-.
28. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh Pide Saleng terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.000.000,-.
29. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh Rusli Madi terealisasi sebesar Rp. 0,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000,-.
30. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh Antonius Adja terealisasi sebesar Rp. 1.000.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.000.000,-.
31. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh Nuryadin terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.000.000,-.
32. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh Sumaya Kadafu Syukur terealisasi sebesar Rp. 400.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.000.000,-.
33. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh Petrus C.K. Werang terealisasi sebesar Rp. 1.000.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000,-.
34. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh Nurjana terealisasi sebesar Rp. 1.000.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000,-.
35. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh Mulya Dahlan terealisasi sebesar Rp. 1.000.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.000.000,-.

36. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh Mustamin terealisasi sebesar Rp. 1.000.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.000.000,-.
37. Sewa Tanah di PPI Tenau oleh UD. Damena terealisasi sebesar Rp. 0,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.10.000.000,-.
38. Sewa Tanah dan Gedung oleh Jamkrida terealisasi sebesar Rp. 30.000.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp.30.000.000,-.
39. Sewa Tanah oleh Makka Sogo (depan Wisma Pola Naikoten I) terealisasi sebesar Rp. 2.000.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp.-. Penerimaan ini di tahun 2019 tidak ditargetkan namun dalam perjalanan ada penerimaan dari Makka Sogo yang menggunakan aset Provinsi.
40. Sewa Tanah di Jl. Basuki Rahmat Naikoten I terealisasi sebesar Rp. 2.000.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp.-. Penerimaan ini di tahun 2019 tidak ditargetkan namun dalam perjalanan ada penerimaan dari yang menggunakan aset Provinsi.
41. Sewa Tanah atau Lahan oleh PT. Sarana Investama (Pantai Pede) terealisasi sebesar Rp. 255.000.000,00,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 0,-. Penerimaan ini di tahun 2019 tidak ditargetkan namun dalam perjalanan ada penerimaan dari pihak PT. Sarana Investama (Pantai Pede) yang menggunakan aset Provinsi.
42. Sewa Tanah di di PPI Tenau (Kuddus) terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp.-. Penerimaan ini di tahun 2019 tidak ditargetkan namun dalam perjalanan ada penerimaan dari yang menggunakan aset Provinsi.
43. Sewa Tanah di di PPI Tenau (Breva Nugraha/PT Mas Kupang) terealisasi sebesar Rp. 6.347.250,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.-. Penerimaan ini di tahun 2019 tidak ditargetkan namun dalam perjalanan ada penerimaan dari yang menggunakan aset Provinsi.
44. Sewa Tanah di di PPI Tenau (Rohima Lubis Bolla) terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.-. Penerimaan ini di tahun 2019 tidak ditargetkan namun dalam perjalanan ada penerimaan dari yang menggunakan aset Provinsi.

45. Sewa Lahan di Fatululi (samping Rumah Sakit Siloam) oleh Suba Suka terealisasi sebesar Rp. 315.878.074,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.-. Penerimaan ini di tahun 2019 tidak ditargetkan namun dalam perjalanan ada penerimaan dari yang menggunakan aset Provinsi.
46. Sewa Lahan untuk PLN (Tegangan tinggi) di Bolok Kabupaten Kupang terealisasi sebesar Rp. 87.500.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.-,- Penerimaan ini di tahun 2019 tidak ditargetkan namun dalam perjalanan ada penerimaan dari yang menggunakan aset Provinsi.
47. Sewa Lahan untuk PLN (Tegangan tinggi) di Kabupaten Nagekeo terealisasi sebesar Rp. 30.750.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.-,- Penerimaan ini di tahun 2019 tidak ditargetkan namun dalam perjalanan ada penerimaan dari yang menggunakan aset Provinsi.

1.2. Belanja

Target Belanja untuk Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan APBD TA. 2019 sebesar RP. 97.594.889.000,- dan mengalami penambahan pada perubahan APBD TA. 2019 sebesar Rp. 3.028.821.250,- sehingga menjadi Rp. 100.623.710.250,- (3,01 %). Dari target tersebut dapat direalisasi sebesar Rp. 89.704.453.694,- (89,15%).

Belanja sesuai struktur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.2.1. Belanja Operasi	Rp. 82.351.727.022,-	Rp. 119.882.839.907,-

Belanja Operasi terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 51.215.105.632,- atau 90,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 56.450.765.080,-.
- b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 31.136.621.390,- atau 91,87% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 33.892.515.920,-.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.2.2. Belanja Modal	Rp. 7.352.726.672,-	Rp. 12.714.000.688,-

Belanja Modal terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp. -, atau - % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. -,
- b. Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 3.857.677.367,- atau 59,27 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 6.508.655.000,-
- c. Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 3.419.174.305,- atau 92,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.767.474.250,00,-
- d. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp. -, atau -% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. -,
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp. 3.875.000,- atau 90,12 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.300.000,-.

2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

2.1. Pendapatan LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi NTT yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Pendapatan – LO tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 659,339,493,679.33,-.

Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 628,049,800,444,- dengan rincian :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor - LO terealisasi sebesar Rp. 230,949,812,840,-.
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO terealisasi sebesar Rp. 227,669,036,440,-.
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO terealisasi sebesar Rp. 169,430,951,164,- .
- b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 688,250,000,00,- dengan rincian :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO terealisasi sebesar Rp. 688,250,000,00,-.
- c. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 30,601,443,235,33,- dengan rincian :

1. Pendapatan Denda PKB dan Denda Tunggalan PKB - LO terealisasi sebesar Rp. 6.649.967.298,-.
2. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO terealisasi sebesar Rp. 23.951.875.937,33,-.

2.2. Beban LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp. **44,808,782,698,-** dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Realisasi 2019</u>
Beban gaji dan Tunjangan - LO	18,205,062,797,-
Beban Tambahan Penghasilan PNS -LO	7,399,689,100,-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	18,857,133,720,-
Uang Lembur Pegawai - LO	346,897,081,-
JUMLAH	44,808,782,698,-

Beban Pegawai – LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai – LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2019 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya.

b. Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang dan Jasa – LO merupakan saldo beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp. **46,621,378,088.50,-** dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Realisasi 2019</u>
Beban Bahan Pakai Habis - LO	1,397,313,796.00,-
Beban Persediaan Bahan/ Material - LO	153,848,500.00,-
Beban Persediaan Barang Cuasi - LO	-,-
Beban Jasa Kantor - LO	4,460,290,969.00,-
Beban Premi Asuransi - LO	269,071,126.50,-
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor- LO	1,119,479,843.00,-
Beban Cetak dan Penggandaan - LO	979,700,137.00,-

Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir - LO	106,000,000.00,-
Beban Makanan dan Minuman - LO	786,535,011.00,-
Beban Perjalanan Dinas - LO	16,197,518,686.00,-
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pihak Ketiga - LO	8,553,125,000.00,-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	49,719,020.00,-
Beban Jasa Konsultasi	11,500,000.00,-
Beban Pemeliharaan - LO	173,355,500.00,-
Honorarium PNS - LO	1,406,750,000.00,-
Honorarium Non PNS – LO	6,273,500,000.00,-
Beban Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat	4,683,670,500.00
JUMLAH	46,621,378,088.50,-

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO merupakan saldo Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp. **4,714,748,386.98,-** yang terdiri dari :

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin : Rp. 3,617,334,878.19,-
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan : Rp. 937,595,183.22,-
3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 44,059,225.57,-
5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya : Rp. 43,711,000.00
6. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya : Rp. 72,048,100.00,-

d. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan - LO

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan – LO merupakan saldo Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp. **1.242,446,500.00,-** adalah dari :

- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan : Rp. **1.242,446,500.00,-**

e. Surplus Defisit LO

Surplus/ (Defisit) dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan – LO dan Beban selama satu periode kegiatan operasi, Surplus/ (Defisit) dari operasi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

	Realisasi 2019
Pendapatan - LO	659,339,493,679.33,-
Beban - LO	<u>97,387,355,673.48,- (-)</u>
SURPLUS/ (DEFISIT) LO	561.952.138.005,85,-

3. NERACA

Neraca Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT adalah Laporan yang menggambarkan posisi Kekayaan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada periode atau tanggal tertentu. Unsur – unsur Neraca Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT terdiri atas :

I. ASET LANCAR

Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, dimiliki atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Aset Lancar sebesar Rp. 41.834.228.569,44,- pada Neraca Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT TA. 2019 terdiri dari :

1. Kas di Bendahara Penerimaan

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rp. 00,-	Rp. 00,-

Pada tahun 2019 tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rp. 122.699.597,-	Rp. 486.988.951,-

Saldo Kas sebesar Rp. 122.699.597,- merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 yang belum disetor ke Kas daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan selisih antara SPJ netto dengan realisasi SPJ yang tidak dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N.1**

3. Piutang Pajak	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp. 1.409.880.797,50,-	Rp. 1.931.204.367,50,-

Jumlah sebesar Rp. 1.409.880.797,50,- merupakan tagihan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2019.

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N.2**

4. Piutang Retribusi	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp. 1.472.500.000,-	Rp. 1.455.000.000,-

Jumlah sebesar Rp. 1.472.500.000,- merupakan jumlah piutang retribusi dengan rincian sebagai berikut :

a. Ruko Friendship	: 1.367.500.000,-
b. Eks Lokabinkra	: <u>105.000.000,-</u>
Jumlah	: 1.472.500.000,-

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N.3**

5. Piutang Pendapatan

Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp. 40.510.295.775,-	Rp. 24.795.438.455,-

Jumlah sebesar Rp. 40.510.295.775,- merupakan piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1 Eks Sekolah Cina	3.500.000,-
2 PT Bunga Lestari	-,-
3 Aset Lainnya	<u>40.506.795.775,-</u>
Jumlah	40.510.295.775,-

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N.4**

6. Penyisian Piutang	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp 2.535.217.201,56,-)	(Rp 1.631.713.358,14,-)

Penyisian Piutang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar (Rp. 2.535.217.201,56,-) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyisian Piutang Pajak : (718.345.701,56,-)
- b. Penyisian Piutang Retribusi : (759.700.000,00,-)
- c. Penyisian Piutang Pendapatan Lainnya : (1.057.171.500,00,-)

7. Beban Jasa Dibayar

Dimuka	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp.648.408.601,50,-	Rp.0,-

Jumlah sebesar Rp. **648.408.601,50,-** belum diakui sebagai belanja Jasa Asuransi di tahun 2019, tapi diakui sebagai Beban Jasa dibayar dimuka.

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N.5**

8. Persediaan

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp. 205.661.000,-	Rp. 8.658.576.300,-

Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. **205.661.000,-** mengalami penurunan sebesar Rp. 8.452.915.300,- dari tahun 2018 sebesar Rp. 8.658.576.300,- sesuai dengan stok opname 31 Desember 2019.

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N.6**

9. ASET TETAP

Aset Tetap Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 112.377.481.031,31,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Aset Tetap Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 53.912.635.000,00,- dan keadaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 53.912.635.000,00,- bertambah sebesar Rp. -,-.

b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 30.850.837.031,43,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 32.277.955.784,43,- bertambah sebesar Rp. 1.427.118.753,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- ☞ Saldo awal 2019 : Rp. 30.850.837.031,43,-
- ☞ Belanja Modal TA. 2019 : Rp. 3.857.677.367,00,-
- ☞ Mutasi antar SKPD (Keluar) : (Rp. 2.241.350.000,00,-)

☞ Koreksi Berkurang (Jasa)	:	(Rp. 142.800.000,00,-)
☞ Kapitalisasi	:	(Rp. 46.408.614,00,-)
☞ Penyusutan	:	(Rp.22.551.146.764,34,-)
Saldo Tahun 2019	:	Rp. 9.726.809.020,09,-

c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 48.101.634.160,99,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 54.217.961.669,99,- bertambah sebesar Rp. 6.116.327.509,00,- dengan rincian sebagai berikut :

☞ Saldo awal 2019	:	Rp. 48.101.634.160,99,-
☞ Belanja Modal TA. 2019	:	Rp. 3.491.174.305,00,-
☞ Mutasi antar SKPD (Keluar)	:	(Rp. 97.990.000,00,-)
☞ Mutasi antar SKPD (Masuk)	:	Rp. 3.945.018.204,00,-
☞ Hibah	:	(Rp. 1.221.875.000,00,-)
☞ Penyusutan	:	(Rp. 6.966.742.409,20,-)
Saldo Tahun 2019	:	<u>Rp. 47.251.219.260,79,-</u>

d. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 1.643.462.502,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.643.462.502,- bertambah sebesar Rp. -, dengan rincian sebagai berikut :

☞ Saldo awal 2019	:	Rp. 1.643.462.502,00,-
☞ Belanja Modal TA. 2019	:	Rp. ,-
☞ Koreksi Kurang	:	(Rp. ,-)
☞ Koreksi Bertambah	:	Rp. -
☞ Restatement	:	,-
☞ Kapitalisasi	:	Rp. -
☞ Penyusutan	:	(Rp. 356.825.751,57,-)
Saldo Tahun 2019	:	<u>Rp. 1.286.636.750,43,-</u>

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 adalah Rp. 3.994.998.204,-, sedangkan keadaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 122.980.000,-.

f. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 360.240.500,- dan keadaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 363.727.900,-. Bertambah sebesar Rp. 3.487.400,-, dengan rincian sebagai berikut :

☞ Saldo awal 2019	: Rp. 360.240.500,-
☞ Belanja Modal TA. 2019	: Rp. 3.875.000,-
☞ Koreksi Kurang	: Rp. .-
☞ Koreksi Bertambah	: Rp. -,-
☞ Kapitalisasi	: (Rp. 387.600,-)
☞ Penyusutan	: (Rp. 286.526.900,-)
Saldo Tahun 2019	: Rp. 77.201.000,-

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N. 7**

10. AKUMULASI PENYUSUTAN

Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar (Rp. 25.490.204.438,14,-) sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp. 30.161.241.825,11,-) bertambah sebesar (Rp. 4.671.037.386,98,-) dengan rincian sebagai berikut :

☞ Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar	: (Rp. 22.551.146.764,34,-)
☞ Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Banunan sebesar	: (Rp. 6.966.742.409,20,-)
☞ Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar	: (Rp. 356.825.751,57,-)
☞ Penyusutan Aset Tetap Tetap Lainnya sebesar	: (Rp. 286.526.900,00,-)
Saldo Tahun 2019	: (Rp. 30.161.241.825,11,-)

11. ASET LAINNYA

Aset Lainnya Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 46.953.632.226,80,- nilai ini bertambah di TA. 2019 sebesar Rp. 55.378.000,-, sehingga total menjadi Rp. 47.009.010.226,80,-, mengalami peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 adalah Rp. 32.579.350.000,-, nilai ini juga masih tetap sama di TA. 2019 sebesar Rp. 32.579.350.000,00,- dari Bangun Guna Serah dan Kerja sama pemanfaatan.

2. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah Rp. 300.155.000,00,-, nilai ini bertambah di TA. 2019 sebesar Rp. 142.224.000,00, sehingga total menjadi Rp. 442.955.000,00,-. Dari nilai tersebut ada Amortisasi Aset Tetap Tidak Berwujud sebesar (Rp. 217.353.000,00,-) Sehingga nilai nettonya sebesar Rp. 225.602.000,00,-.

3. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 adalah Rp. 15.586.360.890,00,-, dan tahun anggaran 2019 besarnya juga masih sama yakni sebesar Rp. 15.586.360.890,00,- yang terdiri dari : Aset Lain Rusak Berat sebesar Rp. 10.427.210.840,00,- dan Aset untuk dihapus sebesar Rp. 5.159.150.050,00,-. Dari nilai tersebut ada akumulasi penyusutan sebesar (1.279.119.662,20,-) untuk aset lain rusak berat dan akumulasi penyusutan sebesar (Rp. 103.183.001,00,-) untuk aset untuk dihapus. Sehingga nilai nettonya sebesar Rp. 14.204.058.226,80,-.

12.KEWAJIBAN

Sampai dengan 31 Desember 2019, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Kewajiban Jangka Pendek berupa Pendapatan Diterima dimuka sebesar Rp. 1.550.815.833,67,- dengan rincian sebagai berikut :

☞ Sewa Tanah sebesar	: Rp. 1.123.732.500,00,-
☞ Sewa Ruko sebesar	: Rp 427.083.333,67,-
Saldo Tahun 2019	: Rp. 1.550.815.833,67,-

Dan Utang Jangka Pendek lainnya yakni Utang Insentif sebesar Rp. 2.937.151.153,-. Jadi total Kewajiban Jangka Pendek tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 4.357.484.403,00,-.

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N. 8**

13. EKUITAS

Ekuitas Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 196.732.752.840,88,- .

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Akhir Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

☞ Ekuitas Awal sebesar	: Rp. 193.128.510.815,45,-
☞ RK PPKD sebesar	: (Rp.549.133.353.925,00,-)
☞ Surplus/ Defisit – LO sebesar	: Rp. 561.952.138.005,85,-
☞ Dampak Perubahan Aset Tetap sebesar	: (Rp. 3.488.215.000,00)
☞ Dampak Perubahan Atas Penyusutan sebesar	: (Rp. 43.711.000,00,-)
☞ Dampak Perubahan Kapitalisasi sebesar	: (Rp. 46.796.214,00,-)
☞ Dampak Perubahan atas Penyisihan sebesar	: Rp. 338.942.656,58,-
☞ Dampak Perubahan atas Piutang	: (Rp. 5.974.762.498,00,-)
☞ Dampak Perubahan atas Perubahan	<u>Rp. -,-</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	: Rp. 196.732.752.840,88,-

BAB IV
INFORMASI TAMBAHAN

A. PENGUNGKAPAN NON KEUANGAN

- **Domisili** Entitas Akuntansi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berlokasi di Jln. Raya El Tari No. 52 Kupang.

- **Legalitas Entitas, sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT serta dijabarkan di Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT sebagai berikut :

Kedudukan : Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi : Susunan Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pendapatan I;
 2. Bidang Pendapatan II;
 3. Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset;
 4. Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Tugas : Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. PENGUNGKAPAN LAINNYA

- **Pendapatan** : Tahun Anggaran 2019 Penerimaan terealisasi sebesar Rp. 638.473.518.265,- dari target sebesar Rp. 646.808.930.311,-. Penerimaan tidak mencapai target sebesar Rp. 8.335.412.046,00,- atau 1,28 %. Jenis Penerimaan yang tidak mencapai target adalah 1. Penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) realisasinya sebesar Rp. 227.669.036.440,- dari target Rp. 244.486.972.710,- atau 93,12%, 2. Penerimaan Retribusi realisasinya sebesar Rp. 818.500.000,- dari target Rp. 1.225.400.000,- atau (66,79%), dan 3. Penerimaan Lain-lain PAD realisasinya sebesar Rp. 9.083.894.251,- dari target Rp. 10.021.066.001,- atau (90,65%).
- **Belanja** : Tahun Anggaran 2019 Belanja terealisasi sebesar Rp. 89.704.453.694,- dari target sebesar Rp. 100.623.710.250,-. Anggaran Tahun 2019 tidak seluruhnya terserap baik di belanja tidak langsung maupun di belanja langsung. Pada belanja tidak langsung terdapat pada belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan di Belanja Langsung terdapat pada 2 kegiatan yang tidak terserap cukup signifikan yakni. Kegiatan Pengadaan Sistem Jaringan, dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset / Barang Daerah tepatnya di belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah dan Belanja Publikasi.
- **Piutang Daerah** di Tahun Anggaran 2019 tidak mengalami peningkatan tapi mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana digambarkan dibawah ini :
 - Piutang Pajak di tahun 2018 sebesar Rp. 1.931.204.367,50,- mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar Rp. 1.409.880.797,50.
 - Piutang Retribusi di tahun 2018 sebesar Rp 1.455.000.000,00,- mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar Rp. 1.339.166.667,00,-.

- Piutang Lainnya tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 24.795.438.455,- mengalami kenaikan di tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 40.510.295.775,00,-.
- Terhadap piutang atas pemakaian aset wisata kuliner dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 ditetapkan piutang sebesar Rp. 104.000.000,-, nilai ini dikoreksi karena penetapan ini berdasarkan lapak atau blok yang ada (40 lapak) namun nyatanya yang dikontrak oleh pihak penyewa hanya 28 lapak dengan total sewa sebesar Rp. 405.100.000,- dan besaran ini sudah direalisasikan oleh penyewa. Dijelaskan pula bahwa seandainya 40 lapak tersebut disewa seluruhnya dan diikuti dengan kontrak maka total sewanya sebesar RP. 561.500.000,- namun nyatanya tidak, sehingga nilai kontrak yang semula (2018) ditetapkan dengan Rp. 561.500.000,- dikoreksi menjadi Rp. 405.100.000,- (28 Lapak) dan ini ada kontraknya.
- Terhadap Piutang atas Kerja sama pemanfaatan aset antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT Sasando Timor Internasional, dapat dijelaskan bahwa nilai yang sudah ditetapkan bersama antara Pemprov NTT dengan PT Sasando Timor Internasional sebesar Rp. 301.415.000,- / tahun selama 20 tahun. Dari nilai kontrak tersebut sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat piutang sebesar Rp. 5.274.762.498 ,-. Namun di tahun 2019 bulan Juli Pemerintah Provinsi mengambil alih aset sebagai akibat wan prestasi yang dilakukan oleh PT Sasando Timor Internasional sehingga dikeluarkan somasi. Somasi ini tidak ditanggapi oleh PT Sasando Timor Internasional maka Pemerintah Provinsi NTT memutuskan hubungan kerja (kontrak). Akibat somasi, hubungan kerja (kontrak) Pemerintah Provinsi NTT menunjuk PT Flobamor Kupang menjalankan manajemen hotel sasando. Dengan demikian berdampak pada hak dan kewajiban batal atau gugur sehingga piutang sebesar Rp. 5.274.762.498 tidak diakui/ tidak dicatat oleh Pemerintah Provinsi NTT. Dari Manajemen yang baru yakni PT. Flobamor Kupang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan Pemerintah Provinsi NTT Nomor : BU.030/180/BPAD/2019 dan Nomor : 13/FLB/VIII/2019, tanggal , 26 Agustus 2019, dengan nilai kontrak per tahun ditetapkan sebagai berikut :
 1. Tahun 2019 (26 Agustus s.d. 31 Desember 2019) : sebesar Rp. 315.000.000,-
 2. Tahun 2020-2023 (1 Januari s.d. 31 Desember) : sebesar Rp. 750.550.000,-, atau sebesar Rp. 3.002.200.000,-
 3. Tahun 2024-2049 (1 Januari s.d. 25 Agustus) : nilainya akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Terhadap Piutang atas sewa aset di Ki Bolok Kabupaten Kupang oleh PT Bunga Lestari tidak dicatat kembali di tahun ini (2019) sesuai kontrak yang telah disepakati selama 25 tahun terhitung dari 19 Januari 2015 sampai dengan 19 Januari 2040. Hal ini dilakukan karena PT Bunga Lestari tidak melanjutkan sewa atas aset dimaksud dengan surat pemutusan sewa oleh mereka kepada Pemerintah Provinsi NTT (Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT).
- Terhadap Piutang sewa aset tanah oleh Koperasi Serba Usaha (Paulus R. Tadung), di tahun 2018 dicatat sebesar Rp. 10.500.000,-, nilai ini dikoreksi atau dikeluarkan karena telah dilakukan penyeteroran oleh penyewa dan bukti penyeterorannya ada.
- Terhadap Piutang sewa aset tanah di komplek UPT Perikanan Pantai Tenau a/n Muliah Dahlan, Petrus C. Kumawerang, Nurjanah dan Jubaidah oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah tidak mencatat kembali piutangnya karena Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTT oleh Bendahara Penerimaan mencatat sebagai penerimaan di Dinas dan hasil konsultasi dengan Badan Keuangan Provinsi NTT (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) bahwa piutang tersebut dieliminasi/ tidak dicatat lagi di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
- Terhadap Piutang sewa aset tanah a/n Drs. Elias Rero, tahun 2018 dicatat piutang per tahun sebesar Rp. 3.800.000,- namun dikontraknya dicatat sebesar Rp. 3.600.000,- sehingga nilai tidak sesuai dengan kontrak ini dikoreksi di tahun 2019 dan dicatat sebesar Rp. 3.600.000,-.
- **Aset Tetap** Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2019 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2018.
Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 113.373.602.960,29,- setelah dilakukan perhitungan terhadap nilai belanja modal tahun berkenaan, nilai batasan kapitalisasi, nilai penyusutan dan pengurangan lainnya maka nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 menjadi Rp. 112.377.481.031,31,-. Rinciannya sebagai berikut :

Saldo Awal 2019	:	113.373.602.960,29,-
Belanja Modal 2019	:	7.352.726.672,00,-
Koreksi Tambah	:	4.018.018.204,00,-
Koreksi kurang	:	(7.695.829.418,00,-)
Penyusutan	:	(30.161.241.825,12,-)
Total Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2019	:	Rp. 112.377.481.031,31,-

Dapat dijelaskan bahwa koreksi bertambah sebesar Rp. 4.018.018.204,00,- dari gedung dan bangunan, dan koreksi berkurang sebesar Rp. 7.695.829.418,00,- berupa mutasi keluar peralatan mesin kendaraan roda empat ke Sekretariat Dewan sebesar Rp. 2.241.350.000,-, mutasi keluar gedung dan bangunan ke Biro Umum sebesar Rp. 97.990.000,-, sisa hibah rumah atlit ke para atlit berprestasi sebesar Rp. 1.221.875.000,-. Koreksi berkurang juga berupa penghapusan aset tetap peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp. 46.408.614,-. Serta mutasi kurang pada aset tetap lainnya sebesar Rp. 387.600,-.

- **Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)** Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 122.980.000,- ini terdapat pada : Kegiatan Renovasi sedang dan berat di Kabupaten Sumba Timur.
- **Kas di Bendahara Pengeluaran** Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat saldo Kas sebesar Rp. 122.669.597,- terdapat pada :
 - Kantor Badan sebesar : Rp. 104.465.966,- dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 10 Januari 2020.
 - UPT PPKAD wilayah Kabupaten Sikka sebesar : Rp. 13.368.942,- sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 03 Januari 2020 dan 06 Januari 2020.
 - UPT PPKAD wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebesar : Rp. 4.232.229,- sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 03 Januari 2020.
 - UPT PPKAD wilayah Kabupaten Ende sebesar : Rp. 632.460,- sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 06 Januari 2020.

BAB V

DENUTUP

Laporan Keuangan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyusunan Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang nantinya dikonsolidasikan untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Keuangan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pelaksanaan APBD.

Demikian Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

DR. ZET SONY LIBING, M.Si
NIP. 19680713 198903 1 009